



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 – 2021
19 Sampai Dengan 23 Oktober 2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2020**



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 – 2021
19 Sampai Dengan 23 Oktober 2020**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Kunjungan Kerja

Pasal 98 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana yang telah diubah sampai dengan perubahan ketiga oleh UU Nomor 13 Tahun 2019 dan Pasal 60 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang mengatur bahwa Komisi dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, antara lain dapat mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, kunjungan kerja dilaksanakan atas Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja dan Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 24 Agustus 2020 antara lain telah memutuskan rencana Kunjungan Kerja pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 dilaksanakan ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi Bali.

B. Maksud Dan Tujuan

Komisi VI DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ini dengan maksud untuk mendapatkan masukan atau temuan yang menyangkut ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI selama Kunjungan Kerja ke Provinsi NTB dan hasilnya akan dilaporkan dalam Rapat Komisi untuk ditindaklanjuti.

Kunjungan Kerja ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas Komisi VI DPR RI di bidang pengawasan yang menitikberatkan pada aspek pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi:

1. pelaksanaan program persaingan usaha.
2. pelaksanaan program kerjasama standardisasi dan penilaian kesesuaian.
3. dukungan BUMN dalam rangka pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),
4. investasi pertambangan,
5. penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan
6. investasi teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan tujuan pelaksanaan kunjungan kerja ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu fungsi Dewan dan akan dilaporkan dalam Rapat Komisi untuk ditindaklanjuti.

C. Obyek Kunjungan Kerja dan Waktu Pelaksanaan

Obyek dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi NTB adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Standardisasi Nasional, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarinah (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Ke Provinsi NTB dilaksanakan pada Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2020.

D. SUSUNAN ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA

Daftar nama Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI pada Masa Sidang di Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

NO	NO. ANG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-33	Faisol Riza	Ketua / F-PKB
2.	A-189	Aria Bima	Wakil Ketua / F-PDI Perjuangan
3.	A-327	Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.	Wakil Ketua / F-PKB
4.	A-103	Mohamad Hekal, M.B.A.	Wakil Ketua / F-P.Gerindra
5.	A-352	Martin Manurung, S.E., M.A.	Wakil Ketua / F-P.Nasdem
6.	A-348	Trifena M. Tinal, B.Sc	F-PG
7.	A-89	Obon Tabroni	F-P.Gerindra
8.	A-135	Hendrik Lewerissa, S.H., L.L.M.	F-P.Gerindra
9.	A-361	Zuristy Firmadata, S.E., M.M.	F-P.Nasdem
10.	A-11	Tommy Kurniawan	F-PKB
11.	A-356	Hj. Melani Leimena Suharli	F-PD
12.	A-506	Abdul Hakim Bafagih	F-PAN

II. INFORMASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA

A. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999), KPPU berfungsi untuk mengawasi mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaksanaan fungsi tersebut oleh KPPU di Provinsi NTB dilaksanakan melalui 4 (empat) pendekatan yaitu penegakan hukum, kajian dan advokasi (pencegahan), pengawasan mitra, dan pengawasan merger.

Pelaksanaan program persaingan usaha di Provinsi NTB yang telah dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum meliputi penanganan dari laporan, perkara persaingan usaha, pencegahan, serta pengawasan kemitraan dan merger.

Sejak Tahun 2012, KPPU telah menangani laporan dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berasal dari Provinsi NTB sebanyak 16 laporan dan laporan yang terakhir di tahun 2017. Laporan yang dihentikan oleh KPPU sebanyak 1 (satu) laporan dan penanganan yang dihentikan oleh KPPU sebanyak 12 laporan, serta penanganan laporan yang dilanjutkan ke tingkat penyelidikan dan telah diputuskan sebanyak 3 (tiga) laporan. Sedangkan dalam Penegakan hukum untuk perkara persaingan usaha di Provinsi NTB yang ditangani dan telah sampai dengan putusan dan sanksinya oleh KPPU sebanyak 8 (delapan) perkara.

Dalam rangka pencegahan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha di Provinsi NTB, KPPU telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Asistensi penyusunan kebijakan persaingan usaha
- b. Advokasi pelaku usaha
- c. Kajian pasar dan industri perdagangan, antara lain : reklame, komoditi telur ayam, harga layanan jasa rapid test dan swab test covid-19, pengadaan barang/jasa bantuan sosial untuk dampak covid-19, garam, rumput laut, dan tembakau
- d. Diseminasi persaingan usaha kepada media, akademisi, pelaku usaha
- e. Kerjasama perguruan tinggi dengan Universitas Mataram

Dalam pendekatan pengawasan kemitraan di Provinsi NTB oleh KPPU dilakukan melalui kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman tentang pengawasan kemitraan kepada pelaku usaha, kegiatan kerjasama pengawasan kemitraan dengan stakeholder di wilayah NTB, dan kegiatan advokasi dan konsultasi kepada pelaku usaha. Sedangkan pendekatan pengawasan merger oleh KPPU dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan aktivitas merger/akuisisi yang melibatkan pelaku usaha di Provinsi NTB.

Strategi KPPU agar manfaat dalam menjalankan tugasnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Provinsi NTB, sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan peran Kantor Wilayah IV yang berkedudukan di Surabaya untuk melakukan pengawasan persaingan usaha sesuai dengan wilayah kerjanya di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.

- b. Memberikan kemudahan akses bagi publik untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi UU No. 5 Tahun 1999 termasuk tata cara melaporkan atau menyampaikan hal terkait dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui kanal-kanal komunikasi yang tersedia diantaranya telepon, whatsapp, email, twitter, dan media lain seperti zoom atau *google meet*.
- c. Memberikan asistensi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan dunia usaha melalui pemanfaatan Daftar Periksa Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha (AKPU) dengan tujuan mendorong lahirnya kebijakan daerah yang tepat sehingga dapat tercipta efektivitas kebijakan yang mendorong iklim usaha yang sehat dan kondusif di daerah sehingga mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- d. Melakukan pengamatan terhadap informasi ketersediaan dan harga berbagai barang/jasa yang ada di Provinsi NTB sebagai bagian dari upaya *early warning system* atas adanya potensi persaingan usaha tidak sehat.
- e. Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang secara sukarela ingin membangun budaya bersaing yang sehat dalam kegiatan usahanya dengan cara mengikuti program kepatuhan persaingan usaha KPPU.
- f. Mendorong pelaku usaha menggunakan *competition compliance* untuk melakukan self review (atau bilamana diperlukan akan mendapat asistensi dari KPPU) terhadap strategi bisnis yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- g. Menjalinkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, akademisi, jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat di Provinsi NTB.
- h. Melakukan pengawasan implementasi kemitraan yang sehat bersama-sama dengan pemerintah daerah dengan membentuk Satuan Tugas Pengawasan Kemitraan.

Dalam mengoptimalkan peran kantor wilayah, KPPU meminta perlu adanya dukungan DPR untuk melakukan penguatan kantor wilayah baik secara kelembagaan, anggaran, maupun SDM-nya.

Kebijakan yang dilakukan oleh KPPU dalam menyikapi pelanggaran hukum persaingan usaha di Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- a. mengedepankan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha khususnya di Provinsi NTB melalui berbagai upaya seperti advokasi, asistensi dan sosialisasi. Pencegahan merupakan prioritas KPPU.
- b. melakukan penegakan hukum secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap menjaga dipenuhinya *due process of law* serta memberi ruang adanya perubahan perilaku.
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat maupun daerah agar iklim usaha di Provinsi NTB dapat semakin sehat dan kondusif sesuai dengan norma-norma persaingan usaha yang sehat.

Dalam mengimplementasikan agar tercipta persaingan usaha sehat dalam penyelenggaraan program Kartu Prakerja di Provinsi NTB, KPPU melakukan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi hasil kajian dan rekomendasi KPPU terhadap Program Kartu Prakerja kepada masyarakat.
- b. Mendorong pelaku usaha yang kompeten untuk turut bersaing menjadi penyedia pelatihan kerja dalam program dimaksud.
- c. Membuka kontak keluhan masyarakat terkait program kartu prakerja.
- d. Pengawasan isu dan informasi dari berbagai sumber secara berkala.

Saran dan pertimbangan KPPU terhadap Program Kartu Pra Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Akses Pasar terkait *Platform Digital*, Lembaga Pelatihan, dan Sistem Pembayaran yang Memenuhi Persyaratan.
- b. *Platform Digital* sebagai *Marketplace*, diantisipasi potensi persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk:
 - 1) Diskriminasi yang dilakukan oleh Platform Digital terhadap Lembaga Pelatihan Independen, terutama apabila Platform Digital memiliki Lembaga pelatihan sendiri atau yang terafiliasi (berbeda dengan Lembaga Pelatihan Independen)
 - 2) Pengenaan syarat-syarat dalam perjanjian yang memberatkan bagi Lembaga pelatihan (*abuse of dominant bargaining position* oleh *Platform Digital*)

- 3) Integrasi produk (jasa lain yang tidak terkait dalam bentuk *tying/bundling*) oleh Platform Digital dengan jenis pelatihan tertentu, terutama untuk Platform Digital yang sudah eksis dalam bisnis e-commerce sebelumnya.
- e. Potensi Kolusi antar *Platform Digital*.
 - f. Lembaga Pelatihan secara daring diseleksi secara ketat sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
 - g. Jenis Pelatihan secara daring diseleksi secara ketat oleh regulator.
 - h. Standar Prosedur yang detail terkait Proses Penilaian Kelayakan Penerima Kartu Prakerja sampai pada Tahan Pencairan anggaran secara Periodik.

Strategi KPPU dalam mensosialisasikan Pelaksanaan Program Prakerja, 8 platform digital dan program terbaru lainnya di Provinsi NTB adalah mengadakan kegiatan forum jurnalis se-wilayah NTB, koordinasi dengan OPD terkait, mengoptimalkan peran perguruan tinggi melalui MoU yang dimiliki KPPU, dan memberikan pemahaman masyarakat akan haknya memperoleh pilihan platform digital terbaik.

B. BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

Di Provinsi NTB, dalam rangka standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mendukung pembangunan, BSN melakukannya melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan perguruan tinggi di NTB.

Pembinaan Penerapan SNI pada UMKM di Provinsi NTB dilaksanakan di Bima, Mataram, Lombok Timur dan Sumbawa.

- 1) Pelaksanaan Penerapan SNI di Bima pada UMKM KTPi Dangga Sia (telah ber SNI) yang memproduksi garam dengan Penerap SNI 3556 : 2016 Garam konsumsi beriodium



- 2) Pelaksanaan Penerapan SNI pada UMKM di Bima pada UMKM UD Arrahman dalam produksi Bandeng Presto dengan Penerap SNI 4106:2009 Bandeng duri lunak.



- 3) Di Mataram dengan UMKM UD Safir Lombok dalam produksi biskuit dengan Penerap SNI 2973:2018 - Biskuit



- 4) Di Mataram dengan UMKM Bee Comb Honey dalam produksi madu hutan.

- 5) Di Lombok Timur dengan UMKM UD Ondak Jaya dalam produksi mesin roasted kopi dengan Penerap SNI 7428:2008 – Mesin pemipil jagung.



- 6) Di Sumbawa dengan UMKM Olat Maras Teknologi dalam produksi mesin pertanian.

Data Laboratorium Uji Tahun 2020 di Provinsi NTB, yang tersebar di Mataram terdapat 8 (delapan) lab uji yang terdiri dari 7 (tujuh) balai yang melayani untuk pengujian kimia, fisika, mikrobiologi, organoleptik, biologi dan dan 1 (satu) lab uji lingkungan dengan bidang uji kimia/fisika. Di Lombok Barat terdapat 4 (empat) yang terdiri dari 3 (tiga) balai untuk pengujian biologi, fisika dan kimia, serta 1 (satu) unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk pengujian biologi. Sedangkan di Sumbawa Barat terdapat 2 (dua) lab uji kimia dan biologi, dan di Bima 1 (satu) lab uji biologi. Penyebaran Lab Uji Tahun 2020 di Provinsi NTB tersebut dapat dilihat pada peta berikut.



Jumlah industri bersertifikat SNI di Provinsi NTB sebanyak 42 produk, yaitu 3 (tiga) tangki PE (Polyethylene), 3 (tiga) produk garam, 1 (satu) minyak sawit, dan 35 air mineral. Sedangkan jumlah organisasi bersertifikat sebanyak 14

(empat belas) organisasi, yaitu 5 (lima) SNI ISO 9001 (SM), 2 (dua) SNI ISO 37001 (SMAP), 1 (satu) SNI 22000 (SMKP), dan 6 (enam) usaha Pariwisata.

Potensi untuk Penerapan SNI 8748:2019 di wisata alam Provinsi NTB dalam Pengelolaan Pendakian Gunung kerjasama dengan pengelola taman nasional adalah Gunung Rinjani, Gunung Doro Leme, Gunung Doro Kuta, Gunung Olet Sangenges, Gunung Doro Oromboha, Gunung Tambora, Pulau Moyo dan Pulau Kenawa.

Inisiasi Penerapan SNI 8013:2014 - Pengelolaan Pariwisata Alam kerjasama dengan pengelola pariwisata/taman nasional, potensi penerapannya adalah Pantai Mandalika, Pantai Pink (Pantai Tangsi), Air Terjun Mata Jitu, Air Terjun Sendang Gili, Pulau Gili Trawangan, Taman Narmada (Pemandian Raja), dan Taman Narmada (Pemandian Raja). Sedangkan Inisiasi Penerapan SNI 8515:2015 - Pengelolaan Taman Hutan Rakyat, potensi penerapannya adalah Hutan Kota Selong, Tahura Nuraksa II, Taman Wisata Alam Suranadi, Tahura Nuraksa, Kumbi, Air Terjun Sendang Gili, dan Taman Wisata Alam Kerandangan.

C. PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PERSERO) ATAU INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (ITDC)

Wilayah Mandalika bukan hanya termasuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), tetapi juga 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) pemerintah pusat, karena memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Keunggulan geoekonomi wilayah Mandalika adalah memiliki objek wisata bahari yang merupakan pantai yang berpasir putih dengan panorama yang eksotis dan berdekatan dengan Pulau Bali. Keunggulan geostrategis wilayah Mandalika adalah memiliki konsep pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan berlokasi dekat dengan Bandar Udara Internasional Lombok.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014, ITDC menjadi badan perusahaan KEK Mandalika dengan zona pariwisata dengan luas 1.035,67 ha yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Tujuan pembentukan KEK Mandalika adalah untuk

mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional.

Dalam konsep KEK Mandalika untuk hiburan dan olahraga, ramah lingkungan dengan menerapkan *Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)* yang mengolah air laut menjadi air bersih, serta pengolahan panel surya, limbah dan sampah. Destinasi olahraga adalah Mandalika *internanational street circuit*, golf, paralayang, motocross dan offroad. Fasilitas golf 27 hole dengan desain standar PGA dan pemandangan Samudra Hindia. Marina & *Cruise* untuk konektivitas dengan Australia dan negara-negara Asia Tenggara. Mangrove center sebagai pusat rekreasi dan penelitian mangrove. Selanjutnya *indoor dan outdoor theme park*.

Rencana infrastruktur pembangunan KEK Mandalika yang dilakukan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembangunan jalan *existing* sepanjang 4 km dilaksanakan di tahun 2016-2018 dan pendanaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui skema penugasan khusus ekspor atau *National Interest Account (NIA)* untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 6,7 km dilaksanakan di tahun 2018-2020. Selanjutnya, rencana infrastruktur jalan kawasan khusus sepanjang 4,3 km direncanakan dilaksanakan tahun 2020-2021, dan pendanaan yang berasal dari *multilateral development bank* atau *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* untuk pembangunan infrastruktur jalan paket 1 sepanjang 11,6 km dan jalan paket 2 sepanjang 13,6 km dilaksanakan di tahun 2020-2023, serta pendanaan dari yang lainnya untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 14 km yang dilaksanakan di tahun 2021-2023.

Sumber pendanaan dari PMN adalah melalui PP 50/2008 dan perubahannya PP 33/2009 dalam bentuk lahan sebesar Rp260 miliar (termasuk IDC, *contingencies dan financing cost*) dan PP 115/2015 sebesar Rp250 miliar dalam bentuk tunai. Pendanaan yang berasal dari *multilateral development bank (AIIB)* e.q Rp3,6 triliun dan pendanaan dari LPEI melalui skema penugasan khusus ekspor (NIA) sebesar Rp118 triliun. Sedangkan total kebutuhan pendanaan untuk pembangunan dan pengembangan KEK

Mandalika sebesar Rp9,25 triliun. Dengan demikian jumlah kekurangan atau kebutuhan pendanaan adalah sebesar Rp3,96 triliun.

Dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang di KEK Mandalika dibutuhkan PMN sebesar Rp500 miliar (13%) untuk memperbaiki struktur modal dan memperkuat arus kas, serta menghindari penambahan financing cost (est Rp 98 miliar) dan menciptakan lapangan kerja terutama pada masa konstruksi saat *recovery* pandemi Covid-19. Dari nilai deskripsi pembangunan infrastruktur di KEK Mandalika layak secara ekonomi (ENPV) sebesar Rp15,6 triliun pada tingkat diskonto sosial sebesar 10%, EIRR sebesar 24,9% dan Benefit-Cost Ratio (BCR) sebesar 1,8 kali, menunjukkan bahwa pengembangan KEK Mandalika memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Hal ini karena, pada sektor lain yang mampu menyerap banyak tenaga kerja (*labor intensive*) adalah pengembangan irigasi untuk pertanian yang dapat menghasilkan EIRR tinggi antara 18%-30%.

D. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) yang dibentuk dari proses nasionalisasi perusahaan Belanda bernama *Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co.* atau NV Vis en Co, saat ini adalah sebuah BUMN dalam bentuk perusahaan terbuka dengan komposisi kepemilikan saham negara sebesar 65,05%.

Kontribusi WIKA dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan KEK Mandalika adalah proyek dari ITDC sebagai berikut.

- Konstruksi infrastruktur jalan, jaringan utilitas air bersih, air kotor dengan nilai proyek sebesar Rp 325.908.410.000,00. Masa pelaksanaan proyek dari bulan Mei 2019 sampai Februari 2021 dengan lingkup pekerjaan drainase, pekerjaan tanah, pekerjaan aspal, pekerjaan struktur, pekerjaan mekanikal elektrik. Realisasi secara keseluruhan pelaksanaan sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 lebih cepat (59,75%) dari rencana awal (57,07%).
- Pembangunan Pullman Hotel & Resort Mandalika yang luas lahannya 45.000 m² dan luas bangunan 28.159 m² dengan nilai proyek sebesar Rp350,2 miliar. Masa pelaksanaan dari Desember 2017 sampai Oktober

2021 dengan lingkup pekerjaan proyek tersebut adalah pekerjaan struktur, arsitek, serta mekanikal elektrik dan *plumbing*. Realisasi pelaksanaan sampai dengan September 2020 telah mencapai 38,46%.

- Pembangunan Pembangunan Konstruksi Jalan dan Taman Ruas C-I, I-I1, E-R-S-T, R-R1 dan Penataan Pantai Kuta dengan nilai proyek sebesar Rp166,28 miliar dengan masa pelaksanaan dari Desember 2016 sampai dengan Mei 2018.
- Pembangunan Tahap I Masjid Mandalika yang luas proyeknya sekitar 3000m² dengan nilai sebesar 41,91 miliar dengan masa pelaksanaan dari Januari 2017 sampai dengan Oktober 2017.

Selain itu, juga melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur darurat Lombok dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai sebesar Rp79.754.785.645. Masa pelaksanaan dari Agustus 2018 sampai Februari 2019 dengan lingkup pekerjaan rehabilitasi fasilitas publik, rekonstruksi sekolah dan pembangunan pemukiman. Dan rehabilitasi perkantoran dari Kejaksaan Tinggi NTB dengan nilai sebesar Rp77.345.480.000 dengan lingkup pekerjaan rehabilitasi konstruksi fisik gedung.

Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan adalah:

1. Kondisi lahan yang masih bermasalah belum sepenuhnya bebas untuk bisa dikerjakan sehingga akan berdampak dengan mundurnya penyelesaian waktu pelaksanaan.
2. Keterkaitan proses pekerjaan konstruksi dengan usaha segmen kegiatan usaha pariwisata existing yang berada di lingkungan pekerjaan proyek yang harus selaras dan tidak menimbulkan efek negatif pada kenyamanan wisatawan di KEK Mandalika.
3. Pemberdayaan masyarakat di sekitar daerah Mandalika untuk dilibatkan sebagai tenaga kerja yang memiliki skill sesuai kebutuhan pelaksanaan proyek masih terbatas sehingga masih perlu mendatangkan tenaga dari luar daerah khususnya dari Pulau Jawa.
4. Situasi Pandemi Covid-19 saat ini awalnya sangat berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas pekerjaan di proyek KEK Mandalika. WIKA melakukan upaya penanganan dan pencegahan mengacu kepada protokol

Covid-19 dengan mengutamakan kesehatan karyawan di lingkungan proyek dengan tetap fokus menyelesaikan sisa pekerjaan.

Hubungan dengan *stakeholder* BUMN yang dilakukan oleh WIKA di Provinsi NTB, antara lain dengan ITDC sebagai pemilik proyek koordinasi untuk setiap informasi yang akan berdampak dengan pelaksanaan di lapangan baik dari aspek teknis pekerjaan maupun aspek non teknis/sosial. Selalu berkomunikasi dengan PT PLN (Persero) sebagai Pemilik Jaringan Listrik Kawasan, bersama pemilik proyek (owner) dalam lingkup pekerjaan elektrikal untuk kendala jalur listrik existing yang belum sesuai terhadap desain jalur listrik dalam paket yang dikerjakan. Dan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebagai kontraktor di jalan Kawasan Khusus/Sirkuit selalu berkoordinasi sehingga area pekerjaan sirkuit dapat diserahkan secara bertahap untuk dilanjutkan proses konstruksi oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Sedangkan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai pengarah kebijakan, WIKA secara tidak langsung dilibatkan dalam agenda penyelesaian lahan klaim dan *enclave* agar dapat segera dibebaskan, serta koordinasi dengan satgas lahan di lapangan dalam melakukan pekerjaan di lahan yang bermasalah tersebut. Juga melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Desa yang ada dalam Kawasan Mandalika seperti Desa Kuta yang dekat dengan area pekerjaan, agar memberikan support terhadap kelancaran kegiatan proyek berupa pengamanan dan dukungan kegiatan sosial yang dibutuhkan oleh desa yang bisa dibantu perusahaan di Kawasan KEK.

E. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

PT Garuda Indonesia Indonesia (Persero) Tbk (GARUDA) merupakan BUMN yang berbentuk perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2011. Pemegang saham pengendali oleh Pemerintah Indonesia dengan kepemilikan saham (60,54%). Sisa kepemilikan saham lainnya dimiliki oleh PT Trans Airways (25,80%) dan dimiliki oleh publik sebesar 13,66%. GARUDA merupakan satu-satunya maskapai penerbangan bintang 5 di Indonesia yang menyediakan jasa transportasi udara, baik untuk tujuan domestik maupun internasional, dan yang memiliki 7 anak perusahaan

yang bergerak dalam bidang usaha penerbangan (Citilink) dan penunjang penerbangan.

Strategi dalam Pre Covid-19 Tahun 2020, perusahaan mampu untuk meningkatkan kinerja dibanding tahun 2019. Tahun 2019 perusahaan berhasil membukukan net profit sebesar USD 7 juta melalui upaya perbaikan di sisi operasional. Pencapaian tahun 2019 masih dibebani permasalahan seperti sewa pesawat yang tinggi, rute internasional yang masih merugi, dan produktifitas karyawan yang belum optimal. Di tahun 2020 mempunyai potensi keuntungan mencapai lebih dari USD 300 juta dari sisi operasional regular dan *charter flight* sebelum terkena dampak Covid-19.

Strategi yang dilakukan dalam operational performace untuk domestik dengan membuka rute-rute baru yang berdampak positif kepada kinerja dan mendukung program pariwisata dalam 10 Destinasi Prioritas. Untuk internasional dengan menutup rute-rute international yang merugi (London & Nagoya) dan mengoptimisasi penggunaan type dan jenis pesawat untuk rute international. Khusus untuk Timur Tengah dilakukan dengan perluasan *channel* distribusi ke seluruh agen dan membuka rute umroh di luar Jakarta seperti Surabaya, Makassar dan Palembang. Sedangkan untuk charter dilakukan dengan mengoptimalkan potensi pendapatan charter domestik dan International dengan berbagai type pesawat yang dimiliki Garuda.

Covid-19 memberikan dampak yang sangat negatif kepada seluruh perusahaan maskapai penerbangan di dunia, termasuk Garuda, sebagaimana ditunjukkan dari pendapatan Garuda yang telah menurun secara sangat signifikan dari Jan-Mei 2020. Pendapatan dari kegiatan usaha penerbangan penumpang dan pengangkutan kargo di bulan Mei telah turun masing-masing sebesar 96% dan 36% dari pendapatan di bulan Januari 2020. Penurunan pendapatan yang sangat besar tidak diimbangi dengan penurunan yang sepadan dari sisi biaya. Walaupun pendapatan Garuda telah menurun sebesar ~90%, biaya operasional Garuda dari Jan-Mei 2020 hanya menurun sebesar ~60%, sehingga menimbulkan gap yang besar antara pendapatan dan biaya

Penurunan biaya operasional lebih kecil dibandingkan dengan penurunan pendapatan karena GARUDA memiliki proporsi fixed cost terhadap total cost

yang cukup besar (46% per FY19). Fixed cost yang harus ditanggung perusahaan dikontribusi sebagian besar dari biaya sewa pesawat & perlengkapan pesawat, biaya pegawai, dan biaya overhead. GAP antara penurunan Revenue Perusahaan dan Biaya menyebabkan masalah likuiditas Perusahaan ditambah dengan adanya kewajiban pinjaman yang jatuh tempo.

Kondisi *Cash Flow* yang tersedia per 1 Juli 2020 sebesar USD14.5 juta dengan estimasi *Cash in* dari *Financing Activity* minimum USD 40jt. Dampak jika tidak terdapat *Cash In* dari *Financing Activity*, perusahaan akan melakukan penundaan pembayaran kewajiban ke Vendor dan Karyawan. Untuk pinjaman bank dan lembaga keuangan, sukuk USD500 juta yang mulanya jatuh tempo di 3 Juni 2020 telah selesai dan berhasil di restrukturisasi menjadi 3 Juni2023. Sedangkan untuk pinjaman jangka pendek (short term - Banks Loan) USD sebesar 668 juta. Untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) sebesar USD100 juta, dan Financial Lease CRJ sebesar USD 45 juta. Sedang hutang usaha dan pajak adalah Avtur USD 374 juta, sewa pesawat USD 340 juta, Ground Handling & Traffic Servicing USD76 juta, Maintenance, Catering, Others USD115 juta dan Rata-rata Outstanding 60-180 hari

Restrukturisasi lessor pesawat yaitu 12 lessor telah disetujui, 13 lessor dalam proses negoisasi, 6 lessor menolak memberikan rent deferral, dan 3 lessor belum memberikan respon. Rasionalisasi personal, 800 pegawai dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) telah dilakukan *upaid leave*, penawaran pensiun dini untuk usia di atas 45 tahun (359 pegawai telah mengikuti program), Pemotongan THP sejak April, *early termination* kontrak PKWT atas cockpit. Sedangkan kondisi efisiensi biaya (*cost efficiency*) yang dilakukan adalah potensial saving usulan masing-masing direktorat dari pemotongan anggaran dan belanja sebesar USD 67 juta, penghapusan biaya *entertainment*, dan pengurangan biaya operasional direksi dan VPs.

Inisiatif yang dilakukan untuk mengelola Gap antara total pendapatan dan biaya operasional selama COVID-19 adalah dengan penundaan pembayaran dan efisiensi biaya sebagai inisiatif jangka pendek dan perbaikan fundamental terkait inisiatif jangka panjang. Beberapa inisiatif telah dilakukan perusahaan, namun belum cukup untuk menutup gap atas dampak penurunan pendapatan dibanding biaya (penurunan hampir 90% dari kondisi normal) sehingga

Perusahaan memerlukan pembiayaan sebesar IDR 9,5Tn yang akan digunakan untuk membiayai biaya operasional (Avtur, sewa pesawat & *maintenance*) agar tetap beroperasi. Untuk itu, perusahaan memerlukan adanya bantuan Pinjaman Modal Kerja dari Pemerintah untuk tetap dapat beroperasi.

Dana Pinjaman Pemerintah akan menjaga status *going concern* GARUDA yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan devisa negara serta menjaga prospek pertumbuhan industri-industri yang terkait dengan industri penerbangan, misalnya industri pariwisata.

F. PT Sarinah (Persero)

Transformasi konsep bisnis atau portofolio PT Sarinah (Persero) adalah menjadi ekosistem bisnis unggulan untuk industri kreatif Indonesia dan merek lokal, baik secara lokal maupun global.

Dukungan PT Sarinah (Persero) dalam rangka Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi NTB adalah :

- Melakukan coaching UMKM NTB
- Membuka Toko di NTB (*Specialty store/ Food & Beverage*)
- Membantu mempromosikan UMKM NTB pada *platform online* Sarinah
- Memberikan tempat untuk UMKM NTB di Sarinah Thamrin dan lokasi lainnya
- Menampilkan produk unggulan UMKM NTB di *Duty Free* dan *Trading House*
- Mengikutsertakan UMKM unggulan NTB pada House of Indonesia
- Mengikutsertakan UMKM NTB pada acara pameran dan bazar Sarinah

Dalam rangka mendukung UMKM, PT Sarinah (Persero) berkolaborasi dengan SMESCO dan pihak lainnya untuk meningkatkan keahlian UMKM. Pelatihan yang dilakukan terkait dengan ritel, yaitu *Inventory Management, Branding & Communication, Labelling, visual merchandising, Capacity building, dan Back office* Keuangan.

G. PT Bank Niaga Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Niaga Indonesia (Persero) Tbk (BNI) di area NTB mempunyai 3 kantor cabang, 24 kantor cabang pembantu, 2 kantor kas dan 1 kantor fungsional *money changer*. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir penyaluran KUR di Provinsi NTB terus mengalami peningkatan. Sampai dengan September 2020, telah menyalurkan KUR sebesar Rp. 407 Miliar ke pelaku UMKM. Jumlah tersebut telah melampaui total penyaluran pada periode yang sama di 2019. Dalam kurun waktu tersebut, penyaluran KUR selalu diatas target dan kualitas penyaluran kredit juga membaik ditandai dengan NPL cenderung menurun dari tahun ke tahun dari 0,28% menjadi 0,14%. Total hingga September 2020 KUR BNI telah disalurkan kepada 16,849 pelaku UMKM di Provinsi NTB.

Dari total kredit sebesar 407,2 miliar, 6.213 debitur (86,4%) dari segmen KUR Kecil dan 3.397 debitur (13,36%) dari segmen KUR Mikro. Kalau dilihat berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran KUR oleh BNI yang paling terbesar realisasi penyalurannya di sektor perdagangan, resto dan hotel (64%), kemudian sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian (22%), dan industri pengolahan (22%).

Program unggulan BNI di Provinsi NTB adalah Program KUR Tani Sinergi korporasi, Program KUR Lombok Timur berkembang, dan Kredit Usaha Rakyat Porang.

Program KUR Tani Sinergi Korporasi, dilakukan dengan berkerja sama dengan perusahaan *off taker*, yaitu M-Tani dan BLFA (Pulau Lombok) dan Kop. Mitra Santri Nasional (Bima). Komoditi pertanian yang dibiayai, yaitu tembakau, jagung, bawang putih dan padi dengan maksimal pembiayaan KUR sd Rp.50 juta kepada 1.931 debitur dengan total Rp.48,7 M. Sebelum adanya KUR Tani produksi petani Jagung per Ha berkisar antara 2 s.d 3 Ton. Dengan adanya pembiayaan KUR Tani, produksi meningkat s.d8 -9 Tonper Ha.



Program KUR Lombok Timur “berkembang”. Program ini merupakan Program Sinergi TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) atas inisiasi dari OJK yang beranggotakan unsur pemerintahan daerah dan beberapa lembaga keuangan termasuk BNI. Program tersebut untuk melakukan pembiayaan penggemukan sapi bagi peternak binaan Pemda. Untuk saat ini BNI Mataram sudah menyalurkan KUR Sapi ke 148 peternak dengan total Rp. 2.22 M. Untuk perkembangan kepemilikan hewan ternak bertambah setiap tahun yang sebelumnya seorang peternak hanya memiliki 2 s.d 5 ekor sapi, saat ini telah mencapai 10 s.d 15 ekor.

Kredit Usaha Rakyat Porang, merupakan Pembiayaan kepada petani porang untuk budidaya tanaman porang memiliki potensi untuk diekspor. Rencana pengembangan tanaman porang seluas 100 Hektar di daerah Gerung, Lombok Barat dengan potensi pembiayaan Rp. 5 Milyar.

Kendala pencairan KUR terkait kelengkapan dokumen-dokumen administrasi dan pandemi covid-19. Salah satu syarat pemberian KUR adalah harus memiliki E-KTP, kendalanya masih terdapat beberapa calon debitur yang belum memiliki E-KTP. Kendalah lain yang sering ditemui adalah ketidaksiapan para calon debitur dalam memenuhi kelengkapan dokumentasi dan Syarat-Syarat Administrasi calon debitur. Selain itu, masih terdapat beberapa calon debitur yang mengajukan KUR namun tercatat didalam data sliik memiliki catatan kredit dengan kolletibility bermasalah atau kredit produktif aktif di bank lain.

Mengenai kendala E-KTP, BNI semakin giat dalam memberikan edukasi kepada nasabah dan membantu calon debitur dalam pengurusan E-KTP di dukcapil.

Untuk mengatasi permasalahan terkait pemenuhan dokumen administrasi BNI menyarankan sejak dini kepada nasabah pelaku UMKM untuk mengurus dokumentasi persyaratan untuk calon debitur juga memberikan bantuan konsultatif terkait pengurusan dokumen-dokumen administrasi tersebut. Disisi lain juga diberikan Relaksasi kepada calon debitur apabila mengalami kendala dalam pengurusan dokumen administrasi pembiayaan KUR.

Sedangkan kepada calon debitur dengan kondisi tercatat memiliki pinjaman di bank lain dan atau catatan kredit dengan kolletibility bermasalah kami berusaha untuk mengedukasi dan mengarahkan agar calon debitur disiplin dalam membayar kewajiban agar memiliki catatan record kredit yang lebih baik serta apabila masih mempunyai kredit produktif di bank lain diarahkan untuk melakukan penyelesaian kredit tersebut sebelum mengajukan KUR.

Kendala tersebut terlihat di tahun 2018 jumlah pengajuan sebanyak 4.112 dan yang disetujui hanya 3.104. Selanjutnya di tahun 2019 jumlah yang mengajukan sebanyak 8.323 dan yang disetujui hanya 6.538, dan tahun 2020 sampai dengan September jumlah yang mengajukan sebanyak 8.341 dan yang disetujui hanya 6.091.

H. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Rencana strategis PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TELKOM) dalam meningkatkan investasi perusahaan maupun anak perusahaan dalam meningkatkan laba di provinsi NTB adalah mempercepat penetrasi *broadband/digital connectivity* dengan mengubah fungsi Tcloud menjadi Data Center, menambah titik *landing point*, meningkatkan penetrasi Fiber Optik, dan Plan pembangunan3 SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut). Juga dengan mengembangkan jaringan seluler dengan penambahan133 *site* reguler dan 3 USO. Selain itu, juga melakukan peningkatan penetrasi *mobile connectivity* melalui *tower site* dan meng-cover area yang belum terjangkau fiber optic dengan akses radio dan satelite.

Keberadaan TELKOM di Provinsi NTB adalah memberikan layanan Telekomunikasi *broadband* kelas dunia untuk mendukung peningkatan ekonomi, sosial masyarakat dan melibatkan sumber daya lokal sebanyak 1.983 orang. Adapun peta layanan yang diberikan TELKOM di Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar berikut.



Kontribusi TELKOM dalam rangka memajukan sektor pariwisata dan meningkatkan Ekonomi dan peran Perusahaan dalam mendukung kemajuan sektor Pariwisata di Provinsi NTB adalah mendukung pariwisata dengan kualitas telekomunikasi terbaik (berbasis SKKL, Fiber Optic, InterIsland,dll), mendorong promo pariwisata, dengan mendekatkan OTT server sosmed mendekat ke masyarakat (Server OTT to Cloud/DC Telkom), mendorong sentra pariwisata dengan Radio True Broadband Experience untuk area pelosok, serta melakukan pengembangan Smart Village Nusantara di Wilayah Provinsi NTB (dalam tahap inisiasi).

Saat ini TELKOM sedang menyiapkan infrastruktur Telekomunikasi kelas dunia di Mandalika (1 dari 5 Destinasi Wisata Super Prioritas) termasuk untuk MotoGP 2021 dan Superbike (SBK).

Peran dan langkah TELKOM dalam penyediaan layanan jaringan internet dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring/online serta dalam rangka mendukung arahan pemerintah terkait pencegahan COVID-19 agar masyarakat beraktivitas dari rumah, baik bekerja (WFH) maupun belajar (LFH) di Provinsi NTB, adalah dengan mengeluarkan beberapa program sebagai berikut:

- Pasang baru IndiHome *Learning From Home* (LFH) dengan berbagai benefit,
- Pasang baru IndiHome Paket Khusus Guru dan Dosen,
- *Free Wifi Corner* (WiCo)
- Layanan *Free* Kuota Akses *Learning Management System* (e-Learning) Universitas

- MBJJ untuk pelajar, Free Akses TSEL ke web daring universitas - Paket Ilmupedia

Selain itu, TELKOM juga menyerahkan bantuan Gadget melalui Program Telkom Peduli untuk Masyarakat yang Berada di Daerah Terpencil dan telah mendistribusikan 198.729 kartu dalam rangka mendukung Program Merdeka Belajar Jarak Jauh (MBJJ).

I. PT Aneka Tambang Tbk.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) merupakan perusahaan yang berbasis sumber daya alam dengan kegiatan operasi yang terintegrasi secara vertikal dan merupakan perusahaan yang terkonsolidasi dalam holding industri pertambangan sejak November 2017.

Penjualan pada semester I Tahun 2020 (1H20) sebesar Rp9,23 triliun dengan komposisi antara lain dari penjualan emas, perak, logam mulia dan jasa pemurnian sebesar 6,29 triliun (68%), kemudian feronikel dan bijih nikel sebesar Rp2,11 triliun (23%), dan bauksit dan alumina sebesar Rp562,65 miliar (6%).

Implementasi prosedur kesehatan yang ketat mendukung kesinambungan produksi dan penjualan perusahaan atau masih terjaga di tengah pandemi Covid-19. Produksi dan penjualan feronikel mengalami penurunan tipis dari produksi dan penjualan di semester I tahun 2019 masing-masing 13.017 dan 13.157 menjadi 12.762 dan 13.045 ton nikel dalam feronikel di semester I tahun 2020. Sedangkan bauksit mengalami peningkatan dalam produksi dari 597 menjadi 807 ribu wmt, tetapi penjualannya mengalami penurunan dari 611 menjadi 565 ribu wmt. Sementara emas mengalami penurunan dari produksi 979 menjadi 850 kg dan penjualan dari 15.741 menjadi 7.915 kg. Begitu juga dengan bijih nikel dari 4.793 menjadi 1.374 ribu wmt dan penjualannya dari 3.900 menjadi 167 wmt.

Dari sisi pertumbuhan kinerja keuangan ANTAM, terlihat pada semester 1 tahun 2020 sebesar Rp 85 miliar dan nilai EBITDA sebesar Rp828 miliar dengan nilai penjualan sebesar 9,23 triliun. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam diagram pertumbuhan kinerja keuangan.

Pertumbuhan Kinerja Keuangan ANTAM



Realisasi kontribusi ANTAM kepada negara di tahun 2020 sampai dengan Agustus 2020 adalah sebesar 435,169 juta yang terdiri dari PNPB sebesar Rp237,254 juta dan pajak sebesar Rp197,916 juta.

Pengembangan usaha atau investasi yang dilaksanakan di Provinsi NTB adalah melalui entitas pertambangan patungan PT Sumbawa Timur Mining dengan kepemilikan saham sebesar 20% dan Eastern Star Resources Pty. Ltd (Australia) sebesar 80%. PT Sumbawa Timur Mining merupakan perusahaan pemegang kontrak karya generasi ke-7 KK emas dan mineral di Kabupaten Dompu dan Bima dengan luas area seluas 19.260 ha.

Tantangan kegiatan eksplorasi dan operasi PT Sumbawa Timur Mining adalah sebagai berikut:

1. Operasi penambangan bawah tanah sistem “*block cave*” adalah kompleksitas aspek teknis dan memerlukan jangka waktu pengembangan yang panjang.
2. Risiko geoteknik adalah memiliki risiko geoteknikal dan memerlukan pendalaman terkait pengumpulan data geoteknikal.
3. Pengembangan akses bawah tanah selama masa studi kelayakan adalah dalam periode studi kelayakan memerlukan pengembangan akses bawah tanah (4-5 km) selama 2-3 tahun menuju sumber daya mineral. Memerlukan optimalisasi rencana tambang dan pengumpulan data geoteknikal, geothermal, geologi dan hidrologi, serta memerlukan pembukaan akses bawah tanah sebagai upaya mempersingkat waktu hingga masa produksi pertama.

4. Kondisi temperatur deposit mineral di prospek Onto bersifat panas sehingga memerlukan proses pengeringan dan pendinginan batuan sebelum dilakukan proses penambangan.
5. Mitigas risiko operasi lainnya adalah operasi penambangan bawah tanah dengan sistem “*block save*” berpotensi akibatkan amblesan permukaan tanah (*land subsidance*) dan lokasi berada di kawasan hutan lindung.

III. CATATAN DAN REKOMENDASI

Dari berbagai data dan informasi, serta catatan yang diperoleh pada saat pelaksanaan kunjungan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VI DPR RI, antara lain:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
 - KPPU harus melindungi UMKM di NTB dengan jumlah 5000 binaan Pemerintah Provinsi NTB
 - KPPU segera membuka kantornya di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingat rakyat NTB sangat membutuhkan untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat.
2. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
 - BSN harus membina dan mendukung UMKM di NTB agar produk-produknya memenuhi standard dan bersertifikat. Untuk itu, BSN diharapkan membuat kantor pelayanan teknis di NTB dan terintegrasi dengan semua pihak.
 - BSN dalam pengembangan standarisasi dan penilaian kesesuaian, diharapkan ada kebijakan mitigasi agar produk lokal terjaga dengan baik.
3. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)
 - Masjidnya yang di lokasi sudah sangat bagus tetapi mengingat Mandalika adalah etalase dunia harus digambarkan keragaman budaya dan keyakinan di Indonesia.
 - ITCD harus memprioritaskan produk lokal dalam setiap aspek kegiatan.
 - ITCD diharapkan melakukan pembinaan terhadap UMKM. Dalam melaksanakan pembinaan tersebut diharapkan dapat bekerjasama

dengan berbagai pihak, khususnya PT Sarinah (Persero) dalam hal *packaging product*.

- Dalam rangka pelaksanaan kegiatan baik nasional maupun internasional, khususnya kegiatan MotoGP 2021, maka kerjasama dengan UMKM sudah harus dilakukan agar kelak tidak tergesa-gesa.
- Penyerapan tenaga kerja sangat minim, karena itu ITDC perlu melakukan kegiatan padat kerja.

4. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Mengingat kegiatan MotoGP 2021 semakin dekat PT Wijaya Karya diharapkan menyempurnakan pembangunan fisik secara sempurna.

5. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Mengoptimalkan fasilitas pelayanan yang dimiliki Garuda dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Kawasan Mandalika, khususnya untuk kegiatan MotoGP.

6. PT Sarinah (Persero)

- Masalah kolaborasi. Sarinah yang akan menjadi gerbong bagi komponen lain
- Mengingat saat ini baru bermitra dengan 10 UMKM sedangkan jumlah UMKM 5000 di NTB, maka diharapkan dapat meningkatkan jumlah kemitraan UMKM dari NTB
- Sarinah harus menjadi yang terdepan sebagai etalase produk lokal Indonesia
- Dalam mengoptimalkan usaha, diharapkan dapat membangkitkan UMKM agar dikenal di nasional dan internasional.
- Dalam rangka
- Sarinah diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak ITDC dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM.

7. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

- Dalam rangka untuk memperluas kredit masyarakat, BNI diharapkan melakukan pembinaan pengelolaan dana.

- Dalam pembiayaan, BNI diharapkan dapat berkonsentrasi agar rakyat harus naik kelas dalam usahanya karena keberhasilan pembiayaan diukur jika efektif penggunaan dan kualitas usaha.
8. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Diharapkan dapat mengoptimalkan jaringan di NTB khususnya antara lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan MotoGP
9. PT Aneka Tambang Tbk
- Pemahaman pengelolaan tambang secara berkesinambungan harus menjadi komitmen bersama semua pihak. Manajemen tambang harus mendasar. Oleh karena itu, PT Aneka Tambang Tbk perlu melakukan perubahan mendasar untuk kepentingan nasional
 - PT Aneka Tambang Tbk perlu melakukan pelatihan bagi penduduk lokal untuk terampil bekerja agar tidak terjadi gejolak sosial
 - PT Aneka Tambang Tbk diharapkan membuat program untuk menyekolahkan penduduk lokal agar ahli dalam ilmu pertambangan agar terjadi hubungan sosial dan kemajuan anak-anak bangsa

IV. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi NTB pada masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021. Sebagaimana diatur dalam Pasal 60 peraturan Tata Tertib DPR, diharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Ketua Tim Kunjungan Kerja
Komisi VI DPR RI,

TTD

FAISOL RIZA
A-33

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN

